OMBUDSMAN MINTA TIDAK GANGGU PELAYANAN PUBLIK

Rabu, 10 September 2025 - jatim

Surabaya, JatimUPdate.id - Ombudsman RI Jawa Timur memanggil Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya terkait sarpras pelayanan publik yang rusak pada aksi aksi unjuk rasa anarkis pada 30-31 Agustus 2025.

Dari informasi yang terkumpul diharapkan dalam mengungkap nilai kerugian material, biaya rekonstruksi, dan timeline rencana pemulihan sarpras tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, penggalian informasi untuk memastikan pelayanan publik dapat kembali normal setelah unjuk rasa anarkis.

"Dari keterangan pemprov, mereka menargetkan Desember 2025 rekonstruksi Grahadi selesai. Sedang dari Pemkot masih menggantungkan pada penganggaran, bisa jadi baru tuntas tahun depan," kata Agus, Selasa (9/9/2025).

Permintaan informasi dilaksanakan di kantor Ombudsman RI Jalan Indragiri 62 Surabaya. Asisten II II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Joko Irianto dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya I Nyoman Gunadi mewakili Pemprov Jawa Timur.

Sedang dari Pemkot Surabaya dihadiri oleh tim teknis dari Bakesbang, Dishub, BPBD, dan OPD lainnya.

Menurut Agus, baik pemprov maupun pemkot juga merinci alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka rekonstruksi dan pemulihan sarpras.

Pemprov, misalnya, memperkirakan rekonstruksi bangunan Grahadi butuh biaya Rp 11 miliar yang diambilkan dari BTT (belanja tidak terduga) APBD. Sedang pemkot butuh sekitar Rp 3,7 miliar.

"Untuk rekonstruksi Grahadi, pemprov sudah melakukan persiapan. Di antaranya membentuk empat tim yang fokus pada pembersihan, kajian sejarah dan rekomendasi (terkait bangunan cagar budaya), perencanaan teknis/konstruksi, dan pelaksanaan," kata Agus.

Pemprov juga telah mengadakan pertemuan dengan Balai Pelestarian Kebudayaan XI Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan Pemkot Surabaya.

Pemkot dilibatkan karena Grahadi merupakan cagar budaya tingkat kota.

Menurut, pemprov mengikuti rekomendasi tim kajian sejarah dalam rekonstruksi Grahadi yang berstatus cagar budaya.

Baca Juga: Kepala Daerah Diminta Peduli Kasus Bullying

